



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-17

MANADO

PUTUSAN

Nomor 3-K/PM. III-17/AD/IV/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara *In absensia* telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SALAMA
Pangkat / NRP : Serka/31960224990375
Jabatan : Babinsa Ramil 1308-11/Liang
Kesatuan : Kodim 1308/LB
Tempat, tanggal lahir : Jeneponto, 25 Maret 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1308/LB Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah

Terdakwa tidak ditahan

Pengadilan Militer III-17 Manado tersebut diatas

Membaca : Berkas perkara dari Dandenspom XIII/2 Palu Nomor BP-14/A-12/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 132/Tdk selaku Papera Nomor Kep/10/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/02/I/2020 tanggal 14 Januari 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor Tap/3/PM. III-17/AD/I/2020 tanggal 29 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor Tap/3/PM.III-17/AD/I/2020 tanggal 29 Januari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/3/PM.III-17/AD/I/2020 tanggal 29 Januari 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 22 hlm Putusan Nomor 3-K/PM.III-17/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendengar : 1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.
 - Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/02/I/2020 tanggal 14 Januari 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah.

- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

- Menetapkan barang bukti berupa surat-surat 18 (delapan belas) lembar Daftar Absensi a.n Terdakwa Serka Salama NRP 31960224990375, mohon tetap disatukan dalam berkas perkara.

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

- Menimbang : Bahwa berdasarkan penelitian berkas ternyata Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-08/A-08/V/2019/Idik tanggal 22 Mei 2019 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka tertanggal 29 Mei 2019 yang dibuat oleh Penyidik Subdenpom XIII/2-3.

- Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang

Hal 2 dari 22 hlm Putusan Nomor 3-K/PM.III-17/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, yaitu :

1. Surat Panggilan dari Kaotmil IV-18 Manado Nomor B/13/II/2020 tanggal 3 Februari 2020.
2. Surat Panggilan dari Kaotmil IV-18 Manado Nomor B/23/III/2019 tanggal 21 Maret 2020.
3. Surat Panggilan dari Kaotmil IV-18 Manado Nomor B/31/IV/2020 tanggal 31 April 2020.

Menimbang : Bahwa dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Terdakwa, yaitu Kodim 1308/Luwuk Banggai telah memberikan jawaban sesuai surat dari Dandim 1308/Luwuk Banggai Nomor B/64/II/2020 tanggal 6 Februari 2020 dan Nomor B/221/IV/2020 tanggal 15 April 2020 yang menyatakan bahwa Terdakwa Serka Salama NRP 31960224990375 Babinsa Ramil 1308-11/Liang tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer III-17 Manado karena Terdakwa mulai tanggal 28 Januari 2019 s.d sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa melarikan diri sejak semula dan telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, namun Terdakwa tidak hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim memandang perlu lebih dahulu untuk menilai apakah perkara ini memenuhi syarat untuk diperiksa secara in absentia atau tidak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa. Selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan penjelasan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 menyatakan penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.

Menimbang : Bahwa jika ditelaah ketentuan pasal 141 ayat (10) dan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997

Hal 3 dari 22 hlm Putusan Nomor 3-K/PM.III-17/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan baru dapat diperiksa dan diputus secara *in absentia*, hal ini tidak sesuai dengan diadakannya ketentuan ini, sebab akan sangat berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi, dan keuangan yang akan dilakukan oleh kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan", hal mana dalam penjelasan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "sederhana" adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien. Sedangkan yang dimaksud dengan "cepat" harus dimaknai sebagai upaya strategis untuk menjadikan sistem peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya/tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara cepat oleh pencari keadilan. Dalam hal ini hak atas keadilan bukan saja milik Terdakwa melainkan juga dimiliki oleh instansi atau tempat kesatuan Terdakwa ditugaskan yang segera menginginkan adanya kepastian hukum mengenai penyelesaian perkara anggotanya yang melakukan tindak pidana desersi agar tidak berlarut-larut.

Menimbang : Bahwa dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, maka untuk menciptakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut serta untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka perkaranya dapat diperiksa dan diputus secara *in absentia* tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali ke persidangan untuk disidangkan tetapi Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dengan alasan tidak mungkin lagi menemukan dan

Hal 4 dari 22 hlm Putusan Nomor 3-K/PM.III-17/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui alamatnya letak dimana Terdakwa berada. Hal ini diperkuat dengan surat dari Dandim 1308/Luwuk Banggai Nomor B/64/II/2020 tanggal 6 Februari 2020 dan Nomor B/221/IV/2020 tanggal 15 April 2020 yang menyatakan bahwa Terdakwa Serka Salama NRP 31960224990375 Babinsa Ramil 1308-11/Liang tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer III-17 Manado karena Terdakwa mulai tanggal 28 Januari 2019 s.d sekarang belum kembali ke kesatuan, sehingga dengan mendasari ketentuan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *in absentia*).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh delapan bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal dua puluh dua bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas di Kodim 1308/Luwuk Banggai, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD berpangkat Serka NRP 31960224990375 jabatan Babinsa Ramil 1308-11/Liang, kesatuan Kodim 1308/LB sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 28 Januari 2019 telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1308/LB atau atasan lain yang berwenang dan sampai saat ini belum kebalik ke kesatuan.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1308/LB, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan ke kesatuan.
4. Bahwa kesatuan Kodim 1308/LB telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di seputaran wilayah Kodim 1308/LB dan tempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.

Hal 5 dari 22 hlm Putusan Nomor 3-K/PM.III-17/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa dengan demikian, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1308/LB sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan dilaporkan ke penyidik Subdenpom XIII/2-3 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-08/A-02/II/2019/Idik tanggal 22 Mei 2019 atau selama 114 (seratus empat belas) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 hari.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1308/LB tanpa ijin yang sah dari Dandim 1308/LB, NKRI dalam keadaan damai baik, dan kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Pelda Abdul Hafid L dan Saksi atas nama Serda Sunandar telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997, namun para saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas dan dinas khusus yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, selanjutnya keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama Lengkap : Abdul Hafid L
Pangkat/NRP : Pelda/626143
Jabatan : Kapok Tuud
Kesatuan : Kodim 1308/LB
Tempat, tanggal lahir : Luwuk, 30 September 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Flamboyan Kel. Hanga-
Hanga Kec. Luwuk Selatan
Kab. Banggai

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun dan keluarga dengan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 pukul 07.00 bertempat di lapangan Makodim 1308/LB dilaksanakan upacara bendera dan waktu itu sebagai Inspektur Upacara Kasdim 1308/LB (Mayor Inf Red Afner), kemudian setelah selesai upacara pukul 07.15 Wita dilaksanakan pengecekan personil dan pada saat itu Terdakwa tidak hadir.
4. Bahwa selanjutnya pada pukul 07.45 Wita Saksi sebagai Kapok Tuud Kodim 1308/LB diperintahkan Kasdim 1308/LB bersama Serka Andi Ahmad Ali dan Sertu Mahendrawan Hamid untuk melakukan pengecekan di rumah Terdakwa di barak Makodim 1308/LB dan dari hasil pengecekan diketahui bahwa Terdakwa tidak berada di tempat dan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.
5. Bahwa Dandim sudah melimpahkan perkara Terdakwa agar diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada masalah baik di dalam maupun di luar kantor.
8. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan Kodim 1308/LB untuk memberitahukan keberadaan dan petunjuk dari kesatuan agar melakukan pencarian.
9. Bahwa upaya dari Dandim 1308/LB dalam hal ini Letkol Inf Nurman Syahreda, S.E telah membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) dan memerintahkan anggota Kodim 1308/LB khususnya anggota Intel untuk melakukan pencarian ke seluruh wilayah hukum Kodim 1308/LB namun hingga sekarang Terdakwa belum ditemukan.
10. Bahwa Terdakwa selama ini tidak pernah melakukan pelanggaran/ tindak pidana.
11. Bahwa Saksi dapat menunjukan bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas yaitu berupa absensi satuan Kodim 1308/LB terhitung mulai bulan Januari 2019 sampai dengan sekarang.

Hal 7 dari 22 hlm Putusan Nomor 3-K/PM.III-17/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sudah berkeluarga namun dimana Istri dan anaknya tidak diketahui keberadaannya saat ini dan mengenai masalah gaji Saksi tidak mengetahuinya.
10. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 1308/LB tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Saksi-2

Nama Lengkap : Sunandar
Pangkat/NRP : Serda/31040343700884
Jabatan : Bamin Intel
Kesatuan : Kodim 1308/LB
Tempat, tanggal lahir : Muna, 27 Agustus 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kodim 1308/LB

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan oleh Oditur Militer adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa hanya mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, serta Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan dari Laporan Kapok Tuud Makodim 1308/LB ke staf Inteldim 1308/LB tanggal 28 Januari 2019 dimana setelah dilakukan pengecekan terhadap Terdakwa diketahui tidak berada di Barak Kodim 1308/LB dan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan atau atasan yang lainnya, tetapi kemungkinan karena masalah keluarga.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai keberadaan Terdakwa namun Saksi pernah menghubungi nomor handphone milik Terdakwa namun saat itu tidak aktif.

Hal 8 dari 22 hlm Putusan Nomor 3-K/PM.III-17/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa upaya dari Dandim 1308/LB dalam hal ini Letkol Inf Nurman Syahreda telah membuat daftar Pencarian Orang (DPO) dan memerintahkan anggota Kodim 1308/LB khususnya anggota Intel untuk melakukan pencarian ke seluruh wilayah hukum Kodim 1308/LB namun hingga sekarang Terdakwa belum ditemukan.
7. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 1308/LB tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

- Menimbang :
1. Bahwa Terdakwa anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Babinsa KORamil 1308-11/Liang dengan pangkat terakhir Serka NRP 31960224990375.
 2. Bahwa Terdakwa Serka Salama NRP 31960224990375 tidak memberikan keterangan karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Dandim 1308/LB Nomor B/64/II/2020 tanggal 6 Februari 2020 dan Nomor B/221/IV/2020 tanggal 15 April 2020.

- Menimbang :
- Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat 18 (delapan belas) lembar Daftar Hadir Absensi dari bulan Januari sampai dengan Mei 2019 a.n. Salama, Serka NRP 31960224990375, Jabatan Babinsa Ramil 1308-11/Liang Kodim 1308/LB, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kapok Tuud Abdul Hafid Lagontang Pelda NRP 626143.

Seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan, kemudian ditulis THTI yang berarti Tidak Hadir Tanpa Izin, dan terakhir ditulis DIS yang berarti Desersi. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

- Menimbang :
- Bahwa selanjutnya Majelis akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana

Hal 9 dari 22 hlm Putusan Nomor 3-K/PM.III-17/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara tindak pidana desersi perlu ditentukan lamanya perbuatan tersebut yaitu sejak dan sampai kapan perbuatannya terhenti.
2. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu desersi terdapat beberapa pendapat yakni :

a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi atau setidaknya sampai dengan para saksi diperiksa oleh penyidik.

b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu desersi adalah berdasarkan waktu ditandatanganinya keputusan penyerahan perkara (Keppera).

c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

3. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat bahwa penentuan waktu batas

Hal 10 dari 22 hlm Putusan Nomor 3-K/PM.III-17/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi, karena komandan satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi. Oleh karenanya apabila Terdakwa masih meninggalkan kesatuan setelah terbit laporan polisi, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan kedua atau pemberat.

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Babinsa Koramil 1308-11/Liang Kodim 1308/LB dengan pangkat terakhir Serka NRP 31960224990375.
2. Bahwa benar Saksi-1 Pelda Abdul Hafid L dan Saksi-2 Serda Sunandar menerangkan pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 pukul 07.00 dilaksanakan upacara bendera di lapangan Makodim 1308/LB.
3. Bahwa benar Saksi-1 Pelda Abdul Hafid L dan Saksi-2 Serda Sunandar menerangkan setelah upacara bendera dilakukan pengecekan dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang jelas

Hal 11 dari 22 hlm Putusan Nomor 3-K/PM.III-17/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa benar Saksi-1 Pelda Abdul Hafid L dan Saksi-2 Serda Sunandar menerangkan selanjutnya pihak kesatuan Kodim 1308/LB melakukan pencarian ke tempat-tempat yang pernah dikunjungi Terdakwa seperti tempat tinggal Terdakwa maupun di dalam wilayah Kodim 1308/LB dan sekitarnya namun Terdakwa tetap tidak berhasil diketemukan, setelah itu Dandim 1308/LB melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom XIII/2 untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.
5. Bahwa benar Saksi-1 Pelda Abdul Hafid L dan Saksi-2 Serda Sunandar menerangkan tidak mengetahui penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa dinas tanpa izin yang sah dari Dandim 1308/LB atau atasan lain yang berwenang.
6. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 18 (delapan belas) lembar Daftar Hadir Absensi dari bulan Januari sampai dengan Mei 2019 a.n. Salama, Serka NRP 31960224990375, Jabatan Babinsa Ramil 1308-11/Liang Kodim 1308/LB, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kapok Tuud Abdul Hafid Lagontang Pelda NRP 626143, menyatakan Terdakwa tidak hadir di satuan sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.
7. Bahwa benar pada tanggal 22 Mei 2019 kesatuan Kodim 1308/LB telah melaporkan Terdakwa ke Denpom XIII/2 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-08/A-08/V/2019/Idik untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun hingga perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 22 Mei 2019 atau selama 114 (seratus empat belas) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
9. Bahwa benar Saksi-1 Pelda Abdul Hafid L dan Saksi-2 Serda Sunandar menerangkan selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dandim 1308/LB atau atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.

Hal 12 dari 22 hlm Putusan Nomor 3-K/PM.III-17/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar Saksi-1 Pelda Abdul Hafid L dan Saksi-2 Serda Sunandar menerangkan pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Dandim 1308/LB atau atasan lain yang berwenang, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan Kodim 1308/LB tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
11. Bahwa benar Saksi-1 Pelda Abdul Hafid L dan Saksi-2 Serda Sunandar menerangkan pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 1308/LB, Terdakwa tidak membawa inventaris satuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan tunggal Pasal 87 ayat (1) Ke-2 jo ayat (2) KUHPM yaitu "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) Ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusannya, sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer"
Unsur kedua : "karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
Unsur ketiga : "dalam waktu damai"

Hal 13 dari 22 hlm Putusan Nomor 3-K/PM.III-17/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur keempat : "lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif berpangkat Serka NRP 31960224990375, Jabatan Babinsa Koramil 1308-11/Liang Kodim 1308/LB.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 132/Tdl selaku Papera Nomor Kep/10/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 menyatakan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Serka NRP 31960224990375, Kesatuan Kodim 1308/LB yang diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado melalui Oditur Militer IV-18 Manado.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinas aktif sebagai Prajurit TNI AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"

Hal 14 dari 22 hlm Putusan Nomor 3-K/PM.III-17/AD/II/2020



Yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, kelederaan atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan “dengan sengaja” menurut M.v.T (*Memorie Van Toelichting*) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 Pelda Abdul Hafid L dan Saksi-2 Serda Sunandar menerangkan pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 pukul 07.00 dilaksanakan upacara bendera di lapangan Makodim 1308/LB.
2. Bahwa benar Saksi-1 Pelda Abdul Hafid L dan Saksi-2 Serda Sunandar menerangkan setelah upacara bendera dilakukan pengecekan dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang jelas
3. Bahwa benar Saksi-1 Pelda Abdul Hafid L dan Saksi-2 Serda Sunandar menerangkan selanjutnya pihak kesatuan Kodim 1308/LB melakukan pencarian ke tempat-tempat yang pernah dikunjungi Terdakwa seperti tempat tinggal Terdakwa maupun di dalam wilayah Kodim 1308/LB dan sekitarnya namun Terdakwa tetap tidak berhasil diketemukan, setelah itu Dandim 1308/LB melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom XIII/2 untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.
4. Bahwa benar Saksi-1 Pelda Abdul Hafid L dan Saksi-2 Serda Sunandar menerangkan tidak mengetahui penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa dinas tanpa izin yang sah dari Dandim

Hal 15 dari 22 hlm Putusan Nomor 3-K/PM.III-17/AD/II/2020



1308/LB atau atasan lain yang berwenang.

5. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 18 (delapan belas) lembar Daftar Hadir Absensi dari bulan Januari sampai dengan Mei 2019 a.n. Salama, Serka NRP 31960224990375, Jabatan Babinsa Ramil 1308-11/Liang Kodim 1308/LB, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kapok Tuud Abdul Hafid Lagontang Pelda NRP 626143, menyatakan Terdakwa tidak hadir di satuan sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.
6. Bahwa benar pada tanggal 22 Mei 2019 kesatuan Kodim 1308/LB telah melaporkan Terdakwa ke Denpom XIII/2 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-08/A-08/V/2019/Idik untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun hingga perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 22 Mei 2019 atau selama 114 (seratus empat belas) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
8. Bahwa benar Saksi-1 Pelda Abdul Hafid L dan Saksi-2 Serda Sunandar menerangkan selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dandim 1308/LB atau atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.
9. Bahwa benar Saksi-1 Pelda Abdul Hafid L dan Saksi-2 Serda Sunandar menerangkan pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Dandim 1308/LB atau atasan lain yang berwenang, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan Kodim 1308/LB tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
10. Bahwa benar Saksi-1 Pelda Abdul Hafid L dan Saksi-2 Serda Sunandar menerangkan pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 1308/LB, Terdakwa tidak membawa inventaris satuan.
11. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD

Hal 16 dari 22 hlm Putusan Nomor 3-K/PM.III-17/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyadari apabila akan meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.

12. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Denpom XIII/2 pada tanggal 22 Mei 2019 tanpa seizin Dansat adalah perbuatan yang disengaja dan melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yang tentukan bagi dirinya yaitu kesatuan Kodim 1308/LB, namun dalam kenyataannya selama kurun waktu tersebut Terdakwa tidak berada di kesatuan Kodim 1308/LB dan tidak diketahui keberadaannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan/tindakan (tindak pidana) itu dilakukan oleh si Pelaku/Petindak.

Yang dimaksud "Dalam masa damai" berarti pada waktu/saat si Pelaku/Terdakwa melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang atau kesatuan dimana Pelaku/Petindak seharusnya berada pada saat ia melakukan tindak pidana itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 22 Mei 2019, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan berperang dengan Negara manapun.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan

Hal 17 dari 22 hlm Putusan Nomor 3-K/PM.III-17/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatnya Laporan Polisi tanggal 22 Mei 2019, Terdakwa maupun kesatuan Kodim 1308/LB tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa yang dimaksud “lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 22 Mei 2019 atau selama 114 (seratus empat belas) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
2. Bahwa benar waktu selama 114 (seratus empat belas) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Hal 18 dari 22 hlm Putusan Nomor 3-K/PM.III-17/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari kewajiban dinasnya baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak sanggup lagi menjadi Prajurit yang berdisiplin tinggi dalam pelaksanaan tugas di kesatuan maupun sebagai abdi Negara dalam rangka menegakkan keamanan dan ketertiban Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Bahwa perbuatan tersebut tidak pantasnya dilakukan oleh Terdakwa karena perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sangat dilarang terjadi di lingkungan prajurit TNI, terlebih lagi sampai dengan dengan perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado ternyata Terdakwa belum kembali ke kesatuan, hal ini membuktikan pula bahwa Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa di kesatuan yang secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh pada pelaksanaan tugas pokok kesatuan. Selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 1308/LB, Terdakwa tidak membawa inventaris satuan.

Hal 19 dari 22 hlm Putusan Nomor 3-K/PM.III-17/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar pedoman perilaku prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit butir 2 dan Sapta Marga butir 5.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer di kesatuan Terdakwa dan prajurit yang lain pada umumnya.
3. Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan dalam kurun waktu yang relatif lama yaitu sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan perkaranya diperiksa dan diputus pada tanggal 16 April 2020 atau selama lebih kurang 444 (empat ratus empat) hari atau selama 14 (empat belas) bulan dan 24 (dua puluh empat) hari, sehingga keadaan ini menjadi keadaan yang memberatkan diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, maupun segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, serta dengan memperhatikan lamanya waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, yaitu sejak tanggal 28 Januari 2019 dan hingga saat perkaranya disidangkan dan diputus pada tanggal 16 April 2020 belum kembali ke kesatuan hal ini membuktikan Terdakwa sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, mental, tanggung jawab, dan kedisiplinan Prajurit maka Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim sependapat, karena sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat 18 (delapan belas) lembar Daftar Hadir Absensi dari bulan

Hal 20 dari 22 hlm Putusan Nomor 3-K/PM.III-17/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari sampai dengan Mei 2019 a.n. Serka Salama, Serka NRP 31960224990375, Jabatan Babinsa Ramil 1308-11/Liang Kodim 1308/LB, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kapok Tuud Abdul Hafid Lagontang Pelda NRP 626143.

Bahwa oleh karena bukti surat tersebut diatas adalah sebagai bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dalam perkara ini maka ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu SALAMA, Serka, NRP 31960224990375, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer
3. Menetapkan barang bukti berupa surat 18 (delapan belas) lembar Daftar Hadir Absensi dari bulan Januari sampai dengan Mei 2019 a.n. Salama, Serka NRP 31960224990375, Jabatan Babinsa Ramil 1308-11/Liang Kodim 1308/LB, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kapok Tuud Abdul Hafid Lagontang Pelda NRP 626143, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 16 April 2020 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Abdul Halim, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020014330876 sebagai Hakim Ketua, serta Subiyatno, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11060006130681 dan Primafika Syofyan, S.H. Kapten Chk NRP 11070085400786 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer J. Prins, S.H. Letkol Chk NRP 548005 dan Panitera Pengganti Sugandi, S.H. Kapten Chk NRP 21950303621075 serta dihadapan umum tanpa hadirnya Terdakwa.

Hal 21 dari 22 hlm Putusan Nomor 3-K/PM.III-17/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Abdul Halim, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020014330876

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Subiyatno, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060006130681

Primafika Syofyan, S.H.
Kapten Chk NRP 11070085400786

Panitera Pengganti

Sugandi, S.H.
Kapten Chk NRP 21950303621075

Hal 22 dari 22 hlm Putusan Nomor 3-K/PM.III-17/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)